

DISERTASI

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENERAPAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN DI SUMATERA BARAT

Oleh:

REMBRANDT

BP: 1031203008



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

ABSTRACT

This dissertation is a result of a research in the implementation of Corporate Social Responsibility, CSR. The Responsibility is essentially expected to improve the welfare of the society particularly in the corporate's area of venture, and the corporate's own employees. The principle of environmental function conservation shall be oriented to the attempt of sustaining the environment in the corporate's venture areas that are affected by any concessions/licenses issued by the government. There are three intertwining issues related to CSR in the environmental-related activities of corporations. *First*, how is the planning formulated by the corporations in the implementation of CSR related to the preservation of environmental functions. *Second*, what are the forms of implementation of CSR in the utilization of natural resources; and *Third*, how is the form of assessment or supervision performed by the local government related to CSR. The research method applied in this Research is the juridical-empiric method by approaching effective positive laws and relate them to the prevailing facts at the same time. This yielded the *das sollen* (ideal condition expected) and the *das sein* (the reality). West Sumatra was determined as Research area since it is an area abundant of renewable and unrenovable source of natural resources. The result indicated that, *first*, corporations planned their CSR implementation to the inclination of providing aids to the society, and these aids were expected to change the prevailing paradigm that society has been the destroyer of environment, into society that are active in environmental preservation. Corporations related to the use of natural resources should implement sustainable development principle, direct and indirect responsibility principles in order to change a view that a society had been considered more of a utilizer of natural resources into more of a sustainer of the resources by means of other activities through CSR. *Second*, the significance of CSR regulation had not been completely comprehended by corporates, and thus CSR had been allocated merely based on the 'fitness' and 'properness'; there hasn't been any legal certainty on the issue. *Third*, supervision from the provincial government have yet been able to be performed as no adequate legislation related to CSR. In order to preserve the environment, it is suggested that: *first*, CSR planning requires the participation of the provincial government and the society as the sustainer of the environment. *Second*, formulation of relevant and clear legislation on the significance of CSR; and third, the supervision performed by provincial government should not only limited to whether or not CSR programs are available, but more on the CSR programs that involve surrounding societies by considering local genius.

Keywords: Preservation, Environmental functions, and CSR

ABSTRAK

Disertasi ini merupakan hasil penelitian dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan/ CSR yang nantinya program ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan karyawan, khususnya dilokasi dimana kegiatan perusahaan tersebut berada. Azas pelestarian fungsi lingkungan harus diorientasikan pada upaya melestarian fungsi lingkungan hidup disekitar lokasi kegiatan yang terkena dampak akibat izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Ada tiga permasalahan yang saling terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan dalam aktifitas yang dilakukan Perseroan Terbatas (PT) berhubungan dengan sumber daya alam. *Pertama*, bagaimana bentuk perencanaan yang dibuat perusahaan dalam penerapan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / *Corporate Social Responsibility/CSR* dikaitkan dengan pelestarian fungsi lingkungan. *Kedua*, bagaimana bentuk penerapan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam .program pelestarian fungsi lingkungan dan *Ketiga*, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program CSR. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu metode pendekatan masalah dengan melihat hukum positif yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang terjadi di lapangan secara bersamaan, artinya akan menjawab antara apa yang diinginkan undang undang / *das sollen* dan apa yang kenyataan terjadi/ *das sein*. Penetapan daerah Sumatera Barat ini disebabkan banyaknya tersedia sumber daya Alam yang terbarukan dan sumber daya alam yang tak terbarukan. Hasil penelitian menunjukan *Pertama* bahwa Perusahaan dalam melakukan perencanaan dalam penerapan CSR lebih cenderung kepada bantuan untuk masyarakat, dan bantuan ini seharusnya dapat merubah pemikiran yang selama ini masyarakat dianggap sebagai perusak lingkungna menjadi masyarakat yang ikut memelihara lingkungan. Perusahaan sumber daya alam harus mengimplementasikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, prinsip tanggung jawab langsung dan tanggung jawab tidak langsung yang bisa merubah pemikiran masyarakat yang selama ini mereka beraktifitas dalam pemanfaatan sumber daya alam menjadi masyarakat yang memelihara sumberdaya alam dengan aktifitas lain sebagaimana program CSR. *Kedua* Pemahaman dalam regulasi pentingya CSR belum dipahami secara utuh oleh pelaku usaha yang disebabkan jumlah anggaran yang akan dikeluarkan perusahaan hanya didasarkan kelayakan dan kepatutan dan tidak adanya kepastian hukum. *Ketiga* pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi belum sepenuhnya bisa dilakukan karena kurangnya pengaturan yang berkaitan dengan CSR. Untuk itu agar lingkungan tetap lestari maka disarankan : *Pertama* dalam melakukan perencanaan penerapan program CSR disamping melibatkan pemerintah Provinsi juga dikutsertakan masyarakat sebagai penyanggah agar lingkungan tetap lestari. *Kedua* dibuat aturan yang jelas dalam perundangan tersendiri tentang pentingnya program CSR dan *Ketiga* pengawasan yang dilakukan pemerintah Daerah Provinsi tidak hanya sebatas adanya program CSR namun diikat dalam sebuah kesepakatan dengan melibatkan masyarakat sekitar dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

Kata kunci : Pelestarian, Fungsi Lingkungan dan CSR

